**Analisis Pengaruh Kompetensi Aparat dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana**

**(Studi Pada Desa di Kecamatan Majalengka)**

**Eli Achmad Mahiri1, Latief Zaenuddin Nur2**

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Email : eliachmadmahiri@gmail.com1 , tiefani298@gmail.com2

|  |
| --- |
| **ABSTRAK***Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa tidak terlepas dari baiknya akuntabilitas pengelolaan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana perlu didukung melalui kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat untuk membangun desa lebih baik lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana di Kecamatan Majalengka. Populasi penelitian adalah seluruh aparat desa di Kecamatan Majalengka yang berjumlah 235 orang. Sampel penelitian berjumlah 100 sampel dengan teknik proporsional random sampling. Jenis data dalam penelitian adalah kualitatif yang dikuantitatifkan (skoring), dengan skala pengukuran likert. Sumber data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuiosiner. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif dan verifikativ. Analisis verifikatif anatar lain uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji kelayakan model, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan variabel bebas terdiri dari kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat, dan variabel terikat Akuntabilitas pengelolaan dana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Partisipasi masyarakat berpengaruh siginifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.***Kata Kunci :** Akuntabilitas Pengelolaan Dana, Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat. |

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) alokasi dana desa (ADD) yang dianggarkan oleh pemerintah pusat terus meningkat, untuk mengelola dana tersebut aparatur desa diharapkan yang berkompeten serta akuntabel agar terbukanya informasi terhadap masyarakat. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting untuk menunjang kegiatan pengelolaan dana desa tersebut, mulai dari pikiran, tenaga, keahlian dan uang. Adapun didukung dengan aparatur yang berkompeten juga akuntabel maka akan tercipta kualitas laporan keuangan yang baik juga dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga nantinya akan tercapai dari tujuan akhir akuntabilitas pengelolaan dana yang maksimal tersebut agar terciptanya tata kelola penyelenggaraan yang baik di pemerintahan desa.

Menurut Mardiasmo (2015:65), akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparat desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa.

Periansya dan Sopian (2019:2), kompetensi merupakan kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seseorang tersebut dapat mengerjakannya serta dapat bertanggung jawab. Kompetensi yaitu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana, mengingat desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar.

Menurut Solekhan (2014:4), partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif masyarakat dalam suatu kegiatan. Lebih lanjut, Solehkan mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa peran serta dalam mengambil keputusan, melaksanakan, menerima mamfaat dan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Sehingga apabila partisipasi penganggaran berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik.

Fenomena yang terjadi yaitu jumlah dana desa yang diterima oleh Kecamatan Majalengka untuk 13 desa pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 7.357.361.000,- dengan rata-rata Rp. 1.123.971.000,-. Oleh karena itu memperhatikan besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, tentunya dibutuhkan akuntabilitas atau tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan dana tersebut.

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana tidak lepas dari kompetensi aparat yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparat desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya. Untuk mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik.

Dari Fenomena dan teori yang diungkapkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “**ANALISSI PENGARUH KOMPETENSI APARAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA (Studi Pada Desa di Kecamatan Majalengka)**”.

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.

**KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**Kajian Teori**

**Akuntansi Sektor Publik**

Sujarweni (2015 : 1) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen dibawahnya. Sektor publik merupakan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan publik tetang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang.

**Kompetensi Aparat**

Periansya dan Sopiyan AR (2020:14) kompetensi merupakan kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi aparat adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010) dalam (Fifit Nur Walyati dan Farida 2020:274) Berdasarkan dari berbagai definisi maka, kompetensi aparat adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh aparatur desa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparat tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Menurut Spencer dan Spencer dalam Sedarmayanti (2016:412), Kompetensi memiliki Indikator antara lain :

1. *Motives*, sesuatu yang secara konsisten di fikirkan oleh seseorang sehinga ia melakukan tindakan.
2. *Traits,* watak yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon berbagai informasi dan situasi dan berprilaku dengan cara tertentu. Watak seseorang di tunjukkan melalui kepercayaan diri, control diri, ketabahan/daya tahan.
3. *Self Contept*, sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki sesorang. Sikap dan nilai di ukur melalui tes kepada responden umtuk mengetahui nilai yang dimiliki sesorang untuk melakukan sesuatu.
4. *Knowledge,* informasi/pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks.
5. *Skills,* kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik tertentu (tugas mental tertentu).

**Partisipasi Masyarakat**

Menurut Inu Kencana (2015:132) partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. Menurut Suratmo (2019:216) mengemukakan bahwa untuk mengukur partisipasi masyarakat diperlukan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek.
3. Partisipasi dalam tahap implementasi tindakan, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

**Akuntabilitas Pengelolaan Dana**

Menurut Sjahruddin Rasul (2019:6) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Mahmudi, 2011 dalam Mada et al, 2017) :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Ketepatan penyampaian laporan

**Hipotesis**

**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

**Kompetensi Aparat(X1)**

**Indikator :**

1. *Motives*
2. *Traits*
3. *Self Contept*
4. *Knowledge*
5. *Skills*.

 Sedarmayanti (2016:412)

**Partisipasi Masyarakat(X2)**

**Indikator :**

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan
3. Partisipasi dalam tahap implementasi tindakan.

Suratmo (2019:216)

**Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y)**

**Indikator :**

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur

Mahmudi, 2011 dalam Mada *et al,* ( 2017)

H1

H2

**METODE PENELITIAN**

**Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif (data kualitatif yang diangkakan). Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sebanyak 235 orang, yang dimana Kadus, Ketua RT dan Ketua RW disini adalah perwakilan dari masyarakat di desa-desa tersebut untuk mengetahui Partisipasi dari masyarakat disetiap desa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode teknik proportional random sampling dimana sampel nya 100 responden sesuai dengan proporsi setiap wilayah.

Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis secara parsial.

**HASIL PENELITIAN**

**Uji Validitas**

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 22 item pernyataan yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel kompetensi aparat, 6 pernyataan untuk variabel partisipasi masyarakat, dan 6 pernyataan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai validitas dari masing-masing pernyataan adalah r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2 (Sugiyono, 2014: 172). Perhitungan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan progrm SPSS 25 dan hasil uji validitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.**

**Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparat**

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap kompetensi aparat menunjukan hasil bahwa, r hitung untuk 10 item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = $n-2$ yakni sebesar 0,169. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan tersebut valid.

**Tabel 2.**

**Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat**



Berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel partisipasi masyarakat menunjukan hasil bahwa, r hitung untuk 6 item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n - 2 yakni sebesar 0,169. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan tersebut valid.

**Tabel 3.**

**Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana**

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana menunjukan hasil bahwa, r hitung untuk 6 item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n - 2 yakni sebesar 0,169. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan tersebut valid.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur yang digunakan dalam mengukir variabel yang akan diukur. Instrumen dapat dikatakan reliabilitas jika alat ukur tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Alpha Cronbach. Nilai batas (cut of point) yang diterima untuk tingkat Alpha Cronbach adalah ≥ 0,60. Hasil dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil uji Reliabilitas**

Hasil pengujian diketahui nilai *Alpha Cronbach* variabel kompetensi aparat sebesar0,768, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,772 dan variabel akuntabilitas pengelolaan dana sebesar 0,765. Nilai *Alpha Cronbach* seluruh variabel tersebut berada pada nilai 0,765 – 0,772 ≥ 0,60. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen pada masing-masing variabel adalah reliabel atau handal digunakan sebagai instsrumen pengumpulan data.

**Uji Normalitas Data**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penelitian memiliki distribusi error yang normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogrof-Smirnov (K-S). Jika Asymp. Sig pada Output Kolmogrov- Smirnov lebih dari 0,05 (5%), maka data (nilai residual) terdistribusi normal. Sedangkan jika Asymp. Sig pada Ouput Kolmogrov-Smirnov kurang dari 0,05 (5%), maka data (nilai residual) terdistribusi tidak normal. Adapun hasil uji normalitas disajikan pada tabel 5 dibawah ini :

**Tabel 5. Uji Normalitas**

Pada tabel 4.14 diatas, diketahui bahwa *Asymp. Sig* pada uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,063 > 0,05 (5%). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikoliniritas adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.**

**Uji Multikolinieritas**

 Pada tabel 6 diatas, diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,896 > 0,1 dan nilai VIF 1,117 < 10. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi sempurna antar variabel bebas kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat, atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas (Dadang Sudirno dan L Suparto (2018:94). Hasil uji heterokedastisitas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2**

**Uji Hetroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut diatas, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas dan dibawah, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana). Hasil uji regresi berganda disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Bergand**

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut diatas, maka dapat disusun persamaan hasil regresi yang diperoleh sebagai berikut :

**Y = 7,330 + 0,198****X1** **+ 0,251X2+ ε**

Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 7,330 dan bertanda positif artinya akuntabilitas pengelolaan dana sebesar 7,330 tanpa adanya pengaruh dari kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat.
2. Koefisien regresi kompetensi aparat sebesar 0,198 dan bertanda positif artinya setiap penambahan satu tingkat pada kompetensi aparat maka akuntabilitas pengelolaan dana akan meningkat sebesar 0,198
3. Koefisien regresi partisipasi masyarakat sebesar 0,251 dan bertanda positif artinya setiap penambahan satu tingkat pada partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana akan meningkat sebesar 0,067
4. Nilai residual (ε) artinya *error* bahwa kesalahan dalam memprediksi data sampel yang dilakukan oleh peneliti.

**Analisis Koefisien Determinasi**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana) dapat dihitung dengan suatu besaran yang disebut koefisien determinasi yang dinyatakan dengan persentase.

**Tabel 8.**

**Analisis Koefisien Determinasi Parsial**

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, nilai zero-order untuk variabel Kompetensi Aparat sebesar 0,583 dan untuk variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0,422, besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung sebagai berikut :

KD = (r)2 x 100%

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Kompetensi Aparat(X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana digunakan rumus KD sebagai berikut :

KD = (0,583)2 x 100% = 33,98%

Artinya bahwa kontribusi variabel Kompetensi Aparat (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana adalah sebesar 33,98%

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana digunakan rumus KD sebagai berikut :

KD = (0,422)2 x 100% = 17,80%

Artinya bahwa kontribusi variabel Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana adalah sebesar 17,80%.

**Uji Kelayakan Model dengan Uji F**

Untuk memprediksi apakah variabel independen (kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat) layak atau tepat *(fit)* terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana) pada Desa se-Kecamatan Majalengka, maka dilakukan uji F yakni dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel.

1. Jika *Fhitung > Ftabel* berarti model yang dipilih yaitu Pertumbuhan Penjualan dan *Return On Asset* sudah tepat *(fit)* dalam Memprediksi Nilai Perusahaan.
2. Jika *Fhitung < Ftabel* berarti model yang dipilih yaitu Pertumbuhan Penjualan dan *Return On Asset* tidak tepat *(*tidak *fit)* dalam Memprediksi Nilai Perusahaan.

Maka Hipotesis ini dapat dikatakan bahwa semua variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen yang di analisis.

**Tabel 9. Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Berdasarkan tabel 9 diatas, menunjukan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 43,179 pada taraf signifikansi 5% dengan df=2 adalah df=n-k-l = 132-2-1=129 maka diperoleh nilai F tabel = 3,07. Hal tersebut menunjukan bahwa pada tingkat signifikasi 5% F hitung 43,179 > F tabel 3,07.. Artinya H0 ditolak, maka kesimpulannya Berarti model yang dipilih yaitu kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat sudah tepat (*fit*) dalam memprediksi akuntabilitas pengelolaan dana.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis Kompetensi Aparat (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada tingkat signifikan α 5%. Dengan kaidah pengujian sebagai berikut :

1. Jika thitung> ttabel : maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika thitung< ttabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak.

#### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh (pada tabel 7) hasil bahwa variabel kompetensi aparat menunjukan nilai t hitung sebesar 6,927 dan t tabel sebesar 1,978 dengan tingkat signifikasi 5% maka t hitung 6,927 > t tabel 1,978 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana dengan demikian hipotesis yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya.

Hal ini dikarenakan apabila kompetensi aparat meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana juga meningkat. Hipotesis pertama menunjukan bahwa kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini menunjukan bahwa dengan dengan adanya kompetensi aparat yang yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang lebih baik lagi.

 Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sarifudin Mada (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Kabupaten Gorontalo. Penelitian Sarifudin Mada menjelaskan bahwa dengan adanya kompetensi aparat yang baik dapat menumbuhkan akuntabilitas pengelolaan dana.

 Sedangkan Penelitian ini berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya menjelaskan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, mewujudkan kesejateraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi.

##### *Pengaruh* Return On Asset *Terhadap Nilain Perusahaan*

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa variabel partisipasi masyarakat menunjukan nilai t hitung sebesar 3,624 dan t tabel sebesar 1,978 dengan tingkat signifikasi 5% maka t hitung 3,624 > t tabel 1,978 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana dengan demikian hipotesis yang kedua dapat dibuktikan kebenarannya.

Hal ini dikarenakan apabila partisipasi msayrakakat meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana juga meningkat. Hipotesis kedua menunjukan bahwa pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka dana desa yang dikeluarkan akan bersifat transparan dan bisa diketahui perkebangan dana desa tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian I Putu Julianto (2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Penelitian I Putu Julianto dan menjelaskan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat

dapat menumbuhkan akuntabilitas pengelolaan dana.

 Sedangkan Penelitian ini berbeda dengan penelitian menurut Anita Firdaus (2019) partisipasi masyarakat berarti partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat di dalam pembangunan baik yang berbentuk pernyataan maupun yang berbentuk kegiatan dengan cara memberi masukan pikiran, tenaga, modal, keahlian, materi dan waktu, serta ikut merasakan manfaat dan menikmati hasil pembangunan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembasahan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Artinya semakin baik kompetensi aparat desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat yang dilakukan maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desanya.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. Kompetensi aparat sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang cocok untuk pengelolaan aset desa, seperti pelatihan akuntansi, perencanaan desa dan lain sebagainya.
2. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu kegiatan – kegiatan desa dan mengawasi keputusan - keputasan yang diambil pemeritah desa menjadi lebih baik karena adanya partispasi masyarakat ini. Dan masyarakat selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan kepentingan desa. Oleh karena itu, pihak aparat harus mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kepentingan desa seperti adanya muasyawarah desa dan musyawarah dusun sehingga masyarakat akan turut ikut serta dalam kepentingan desa.
3. Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana dilihat dari kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar penulis selanjutnya menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi misalnya dengan sistem akuntansi keuangan dan pengendalian internal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agung Prasetyo, Dwi dan Darmayanti. 2020. Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, dan Efesiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada PT BPD Bali. Jurnal Manajemen Unud. Vol. 4 No.9, 2020.

Carino, Ledivina V. 2017. Bureaucracy for Democracy: The Dynamics of Executivea and Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions, Manila: CPA University of the Philippines.

Dadang Sudirno dan L. Suparto. 2018. Metodelogi Penelitian Manajemen & Akuntansi. Universitas Majalengka

Fifit Nur Walyati dan Farida. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo.

Inu Kencana. 2015. Manajemen Pemerintah. Jakarta : PT. Perca

Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

J.B. Ghartey. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba

Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset

Moch. Solekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press, Malang

Mada et al. 2017. Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BAPPENAS, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik.

Nafidah. 2016. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).Jurnal.Universitas Negeri Surabaya.

Periansya dan Sopiyan AR. 2020. Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Risert Terapan Akuntansi, Vol.4 No.1.2020

Pasaribu dan Simanjuntak. 2018. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2018

Parwoto. 2016. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru : Red Post Press.

Renyowijoyo, Muindro. 2018. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: mitra Wacana Media

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama.

Siti Irene. 2017. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Siti Patimah. 2019. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Jurnal Administrasi Negara, vol 2, No. 1, hlm. 380-394.

Suratmo. 2019. Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jurnal Pendidikan Geografi, vol 3. No 2, hlm. 42-50.

Sjahruddin Rasul. 2019. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Suharimi Arikunto. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Trijuwono. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publising

Usman. 2015. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Yulianti. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan, vol 2, No 1, hlm. 612-625.

Anita Firdaus.2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, vol 15, No 3, hlm. 292-293.